

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kiai merupakan salah satu tokoh yang sangat sakral, ucapan dan perilakunya menjadi rujukan masyarakat serta selalu menjadi *uswah hasanah*, tidak ayal jika sampai sekarang selalu dijadikan *icon* di bumi nusantara ini. Perilaku kiai selalu menjadi cerminan masyarakat, sehingga kiai harus berhati-hati, baik dalam berucap, dan berperilaku sebab mengandung sosio-religi yang ketat, atau diistilahkan sebagai “*al-muntaha ilaihi al-qaul* (fatwa kiai sebagai tempat rujukan pokok)” (Hajar, 2009: 22). Berbeda dengan *blater* identik dengan orang yang selalu membawa senjata tajam, sabung ayam, dan selalu terlibat dalam dunia kriminalitas atau aksi kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, namun *blater* juga memiliki jiwa kesatria bila ada persoalan, *blater* selalu berada di garda terdepan untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, sehingga adanya juga ditokohkan oleh masyarakat utamanya di Madura bagian barat yaitu Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Salah satu peran *blater* di daerah Bangkalan memberikan keamanan kepada masyarakat sehingga keberadaannya sangat disegani, dan ditokohkan (Kosim, 2007: 3).

Secara spesifik dan substantif dalam penelitian ini, peneliti meneliti hegemoni dua tokoh tersebut, sebab kedua elite lokal ini memiliki kekuatan, menggalang, dan mengorganisir massa dalam proses pesta demokrasi Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Dalam kehidupan sosial masyarakat kedua tokoh tersebut tidak jarang menggunakan statusnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan baik

berkenaan dengan kekuasaan, kemenangan pilihannya diajang pesta demokrasi, dan lain sebagainya. Penelitian tentang hegemoni kiai dan *blater* dalam proses pemenangan Pilpres 2014 (Studi Kasus di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan), berangkat dari sebuah realitas, di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Masyarakat mayoritas mengikuti apa kata kiai sebab konstruksi sosial masyarakat kalau tidak memilih pilihan kiai dianggap *langka* karena masyarakat Desa Socah masih menghormati *buppa*, *babbu*, *guruh*, *rato* sehingga apapun bentuknya meski itu kurang sesuai dengan pilihan dirinya akan diikuti, mereka meyakini bahwa pilihan kiai jauh lebih baik dibandingkan pilihannya sendiri, falsafah tersebut bagi masyarakat Desa Socah Kecamatan Socah merupakan sesuatu yang sakral dan menjadi kultur yang wajib diutamakan karena kiai adalah guru yang selalu memberikan pelajaran dalam setiap langkah mereka (Kosim, 2007: 2).

Namun menurut Harris (2004) dalam (Rozaki, 2009: 8), semenjak era reformasi hingga sekarang ada elite lain yang juga mengharuskan masyarakat Bangkalan secara umum, desa Socah secara khusus untuk diikuti yaitu *blater* sebab disamping sosok ini memberikan keamanan juga mengintimidasi masyarakat bila tidak mengindahkan apa yang telah menjadi pilihannya, hal ini dapat dibuktikan pada Pemilihan Presiden Republik Indonesia, hari Rabu tanggal 9 Juli 2014. Masyarakat Desa Socah juga mengikuti *blater* dalam menentukan hak politiknya, karena bagi masyarakat taruhannya adalah keamanan desa, jika masyarakat tidak mengikutinya maka, desa akan kurang aman dari tindak kriminal, pembacokan, curanmor, dan lain sebagainya. Tekanan dan intimidasi tersebut menghegemoni masyarakat Desa Socah Kecamatan

Socah. Setiap malam menjelang Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 para *blater* memperkuat basis massanya melalui warung kopi, diacara *remoh (to'oto')*, jaringan anak buah untuk mengorganisir massa dan memastikan masyarakat yang tidak sejalan dengan pilihan *blater*, dan yang tidak sejalan biasanya ada tekanan dari *blater* tidak mendapat perlindungan keamanan dari elite lokal tersebut.

Berbeda dengan kiai menjelang pemilihan Presiden Republik Indonesia 2014 yang digelar pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 para kiai di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupten Bangkalan. Semakin sering hadir kemasyarakat dengan mengisi pengajian, yasinan, tahlilan yang ujungnya diisi dengan ceramah, dan diceramah inilah kiai menyelipkan pilihan tertentu dimasyarakat dengan dalih pilihannya memiliki komitmen kebangsaan atau nasionalisme yang kuat dan tidak mau dijajah oleh asing, memiliki keimanan dan ketakwaan serta lebih tegas (*Merdeka*, 30/5/14). Sehingga sadar atau tidak masyarakat Desa Socah Kecamatan Socah terhegemoni untuk mengikuti kedua elite lokal tersebut, selain itu juga kiai dalam proses pemenangan Pilpres 2014 memanfaatkan santri dan alumni sebagai basis massa.

Begitupun Kabupaten Bangkalan secara umum berdasarkan penelitian, kiai dan *blater* merupakan rezim kembar yang sama-sama elite dipandang dari berbagai aspek (Rozaki, 2004: 23) Ditengah pelik dan rumitnya politik Bangkalan telah mampu mendorong masyarakat Bangkalan memenangkan calon presiden nomer urut 1 Prabowo-Hatta dengan hasil suara 644.608 dan Jokowi-JK 14.9.258 dalam lingkup Kabupaten Bangkalan (*Republika*, 16/7/14). Banyak yang menuding hasil pelaksanaan Pemilu Presiden Republik Indonesia, 9 Juli 2014 di daerah Bangkalan

melakukan kecurangan secara massif, terstruktur, dan sistematis. Sehingga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapil) pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengusut kasus premanisme dan vandalisme dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur (*Metrotvnews*, 14/7/14).

Menurut Marwan, kecurangan Pemilihan Presiden di Sampang dan Bangkalan tidak bisa ditoleransi. Kecurangan yang terjadi sudah menunjukkan cara-cara yang tidak beradab yang dilakukan secara massif, terstruktur, dan sistematis. Apalagi kecurangan Pemilu tersebut disertai dengan adanya intimidasi dan penghilangan nyawa terhadap para saksi, Bawaslu dan KPU setempat, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Namun hal tersebut mampu dijawab oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan Fauzan Ja'far, di Kabupaten Bangkalan tidak ada kecurangan, karena pihaknya sampai diputuskannya nomer urut 1 Prabowo-Hatta menang dari nomer urut 2 Jokowi-Kalla, tidak menerima laporan kecurangan (*Republika*, 14/7/14).

Selain dari pada itu, menurut De Jonge (1995) dalam Rozaki (2009: 3) cikal bakal lahirnya *blater* di Madura adalah pada era tahun 1710-an, dan sempat selalu menjadi perhatian publik khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sosok ini sangat langka di Madura bagian timur sebab bagian timur Sumenep dan Pamekasan menyebutnya dengan istilah bajingan. Kajian peneliti ini lebih memfokuskan di daerah yang juga rawan dan kental dengan persoalan politik yaitu di Desa Socah

Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebab merupakan salah satu desa di Bangkalan yang antik dan penuh dengan dinamika perpolitikan yang sangat tidak penentu, kiai dan *blater* memiliki pengaruh yang sangat strategis untuk menentukan kebijakan dan persoalan pelik yang ada di Bangkalan. Hampir semua kepala desa di daerah Bangkalan yang menjabat, terah politiknya kiai atau *blater* dan jabatannya hanya sementara (Anam, 2014: 4). Begitupun yang menjadi panutan adalah kedua tokoh tersebut, terkait kemenangan pesta demokrasi baik Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Bupati, dan Pemilihan Presiden Republik Indonesia, kiai dan *blater* selalu adu kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan sehingga simbolisasi yang melekat pada kiai dan *blater* selalu dijadikan alat untuk menghegemoni masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang *“Hegemoni Kiai dan Blater dalam Proses Pemenangan Pilpres 2014 (Studi Kasus di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupten Bangkalan)”*. Sebab kedua elite tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam proses kemenangan pemilihan presiden republik Indonesia tahun 2014 khususnya di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Bagaimana kiai dan *blater* menghegemoni masyarakat dalam proses kemenangan pemilihan presiden republik Indonesia tahun 2014 di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami hegemoni kiai dan *blater* dalam proses pemenangan pemilihan presiden republik Indonesia tahun 2014 di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Literatur ilmiah untuk penelitian selanjutnya khususnya tentang kiai dan *blater*.
2. Pengembangan teori hegemoni kiai dan *blater*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang hegemoni kiai dan *blater*
2. Memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat tentang politik praktis dalam rangka terbangunnya pendidikan politik

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu tentang hegemoni kiai dan *blater*, peneliti melakukan peninjauan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini melalui berbagai sumber, baik dari buku, jurnal, skripsi maupun literatur ilmiah lain yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Di bawah ini adalah uraian beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan untuk dianalisis dan dikritisi dilihat dari pokok permasalahan, teori, dan metode, sehingga dapat diketahui letak perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian sebelumnya diantaranya adalah Mohammad Kosim tentang “*Kiai dan Blater (Elite lokal dalam Masyarakat Madura)*” (2007). Dalam penelitian ini dijelaskan pengaruh kiai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Pengaruh kiai cukup beragam tergantung pada asal usul genealogis, kedalaman ilmu agama yang dimiliki, kepribadian, kesetiaan menyantuni umat, dan faktor pendukung lainnya. Luasnya pengaruh kiai dalam masyarakat Madura dapat dilacak dari aspek sejarah islamisasi Madura dan aspek kronologis. Selain kiai, komunitas lain yang menjadi elite dalam kehidupan sosial politik masyarakat Madura adalah *blater*. Peranan dan pengaruh *blater* biasanya diperoleh karena kemampuan dalam ilmu kanoragan, ilmu bela diri, ilmu kekebalan, sikap pemberani, dan jaringan anak buah yang banyak dan luas.

Hubungan kiai dan *blater* tidak jarang kurang harmonis dikarenakan “persaingan” dalam Pilkades. Sebagai kaum elite di desa, kiai kadang tidak bisa melepaskan diri dari aksi dukung-mendukung calon, baik secara langsung ataupun tidak. Jika figur yang didukung kiai berbeda dengan yang diusung *blater*, maka “persainganpun” kadang terjadi. Demikian pula dalam kasus Pemilu dan Pilkada, keduanya bisa terlibat konflik karena perbedaan Parpol atau calon. Upaya kiai dan

aparatus keamanan untuk membasmi tempat maksiat, tidak jarang mendapat perlawanan dari kaum *blater*.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rozaki tentang “*Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura*” (2009). Dalam penelitian ini Rozaki menulis peran *blater* mulai bergulirnya reformasi. Sejak reformasi kiprah *blater* mengalami perubahan yang sangat meningkat, dulu *blater* hanya berpolitik dilingkaran “ekor” kini mulai merambat dipuncak kepala. Dari menjalani bisnis kekerasan dipangung politik kultural, kini jejaringnya makin meluas diranah politik formal. Dari politik jalanan keranah birokrasi kekuasaan.

Persyaratan birokrasi dalam memenangkan tender proyek pembangunan yang dulunya dikuasai kaum profesional, kini mulai dirambah kaum *blater*. Berbagai formula persyaratan mengikuti tender proyek pembangunan mulai diadaptasi oleh kaum *blater*. Tak heran bila konflik kepentingan antar komunitas *blater* dalam perebutan proyek pembangunan kini juga mulai bermunculan meskipun belum berkembang pada pusaran konflik terbuka, terlebih sampai bersifat fisik.

Dinamika politik ditingkat desa dan juga tingkat kabupaten, energinya berada didua komunitas, yakni *blater* dan kiai. Kalau kedua komunitas ini memiliki *concern* terhadap perbaikan kualitas layanan publik masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya dalam tatanan kuasa pemerintahan maka pelaksanaan otonomi dan desantralisasi politik di Madura akan mengdulang masa depan yang menggembirakan. Namun, bila kedua komunitas ini tidak memiliki *concern* atas perubahan dan perbaikan maka masyarakat Madura akan menghadapi

masa-masa suram, justru ditengah era desantralisasi yang menjadi dambaan banyak pihak yang begitu lelah dengan sentralisasi di era orde baru. Memang ada komunitas lain diluar kedua mainstream itu, yakni kalangan akademisi. Namun perannya masih belum signifikan dalam mempengaruhi politik kuasa di Madura.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Subiyakto tentang "*Keterlibatan Kiai Dalam Pilkada: Studi Kasus Pilkada Banjarnegara Tahun 2006*" (2011). Peneliti menyimpulkan dalam penelitiannya tentang politik kiai kedalam dua hal. *Pertama*, kiai sebagai aktor. Bergabung ke dalam partai politik tertentu dan menjadi tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati. Aktivitas politik yang mereka lakukan adalah dengan mengenalkan pasangan calon yang didukung kepada masyarakat melalui mimbar-mimbar agama.

Para kiai juga tidak sungkan mengajak pasangan calon dalam setiap agenda sosial kemasyarakatan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat sendiri ataupun pihak pesantren. *Kedua*, kiai sebagai partisipan. Yaitu mereka yang sebenarnya sudah masuk kedalam partai politik tertentu dan namanya tercantum dalam tim sukses. Namun, mereka tidak secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon yang didukung. Kiai ini berpandangan bahwa masyarakat pada dasarnya akan mengetahui dan mengikuti dengan sendiri mengenai pilihan politik kiai. Kiai modal ini juga mempersilahkan dan mendorong mesin politik (kader partai) bergerak lebih banyak dari pada dirinya. Hal ini agar peran kiai sebagai pemimpin agama tetap terjaga dengan baik.

Sementara itu, fokus berbicara peran *blater* adalah penelitian yang dilakukan oleh Ardie Radhie Raditya tentang “*Politik Keamanan Jagoan Madura*” (2011). Peneliti menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa demokrasi dijadikan peluang untuk meraup modal kekuasaan oleh komunitas jagoan lokal di Madura (*blater*). Mereka sangat piawai dalam menciptakan rasa takut masyarakat menjadi komoditas kekuasaan untuk ditransaksikan secara politik, terutama pada saat proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Mereka lantas secara tidak langsung telah membentuk hubungan struktural fungsional antara penguasa dan aparat keamanan legal.

Dengan didukung budaya keberanian dan nilai-nilai penghormatan, para *blater* semakin lincah bermain dengan rasa takut masyarakat dalam merangkai politik keamanan di era demokrasi. Keberanian yang ditunjukkan oleh kaum *blater* di Madura menunjukkan bahwa kekuasaan tidak melulu diraih oleh kekuatan modal ekonomi maupun politik dalam arti menduduki jabatan struktural politik. Kaum *blater* menunjukkan cara berkuasa lewat nyali dan keberanian. Modal kuasa itu ada apabila seseorang ataupun sekelompok orang mampu memiliki modal kekuasaan adalah menggunakan keberanian dan segala kemampuan yang ada dalam diri dan komunitasnya dalam menghadapi tantangan dan resiko apapun.

Penelitian yang dilakukan oleh Hoirul Anwar tentang “*Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Blater di Desa Dlambah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan*” (2008). Dalam penelitian ini peneliti lebih melihat *blater* dari aspek positifnya, Sebab tradisi *blater* di Desa Dlambah Laok selalu membela masyarakat ketika ada persoalan pun menyelesaikan masalah ketika diperadabkan

dengan aparaturnya pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan ketika ada barang hilang bukan lapor kepolisian tetapi lapor ke *blater* untuk diurus, dan biasanya dalam waktu dekat bisa ketemu dan kalau lapor polisi biasanya motor hilang. dan disinilah *blater* sangat disegani oleh masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh R. Aryo Bagus Pratama tentang “*Fenomena Konflik Antar Blater Di Desa Banyuwajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*” (2015). Alhasil dalam penelitian ini, Konflik *blater* yang terjadi di Desa Banyuwajuh disebabkan perebutan wilayah kekuasaan yang digunakan untuk mata pencarian, perluasan kekuasaan, pembagian pendapatan dan kekerasan kepada *blater* itu sendiri, anggota keluarga maupun sanak saudara yang mengakibatkan carok antar *blater*.

Persamaan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kiai dan *blater* sebagai elite lokal di Madura yang memiliki kekuatan dari berbagai aspek baik dalam pesta demokrasi, pengamanan, dan kepercayaan masyarakat, serta keterlibatan kiai dan *blater* dalam politik. Peneliti sebelumnya hanya terfokus kepada kekuatan dan pengaruhnya saja dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang menjadi persamaan dengan penelitian ini. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan, bagaimana kiai dan *blater* menghegemoni masyarakat sebagai sarana atau alat untuk mendapatkan suara yang banyak pada Pilpres 2014. Disadari atau tidak kedua tokoh tersebut selalu dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk menentukan hak politik utamanya dalam Pemilu yang menjadi kajian dalam tulisan ini.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Teori Hegemoni

Secara substansial teori hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci, seorang pemikir dan aktivis marxis asal Italia. Mencoba memperbaiki teori Marx yang dianggap tidak mampu menumbuhkan kesadaran kaum proletar untuk melakukan revolusi. Karena Marx dan kaum marxis berikutnya melihat negara berkuasa hanya dengan kekuasaan represif. Sementara para penguasa sejak abad ke-20 mendominasi dengan cara-cara halus, yaitu melalui kehidupan masyarakat sehari-hari meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan cara-cara represif. Dominasi kekuasaan dengan cara halus masuk kedalam ruang-ruang kultural, seperti agama, dan moralitas. Itulah yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni. Oleh karenanya, kaum buruh sulit melakukan gerakan sebab musuh kekuasaan tidak selalu mendominasi secara fisik, tetapi mental (Sugiono, 2006: 32).

Demikian juga Gramsci dikenal sebagai pemikir besar yang lahir dari situasi politik yang menyengsarakan, dan meninggal pada tanggal 27 April pada usia 46 tahun juga dalam kesengsaraan bahkan ironisnya, kekuasaan fasis yang menindasnya membuat dia tidak pernah melihat seperti apa wajah anak bungsunya (Patri & Arief, 1999: 42-54). Pada tahun 1934, ia menulis sebuah makalah tentang *On The Margin History : History Of The Subaltern Sosial Group*, dalam tulisannya ini ia mempopulerkan konsep *subaltern* yang dimaksudkan untuk menggambarkan golongan atau kaum terpinggirkan yaitu manusia kecil yang tidak punya daya. Istilah ini sebenarnya berarti “perwira dibawah kapten” kemudian berkembang pada makna

orang-orang tertindas, diskripsi tentang berbagai kelompok yang terhegemoni dan dieksploitasi serta kurang memiliki kesadaran kelas.

Gramsci tidak sepenuhnya meninggalkan pandangan dari kalangan marxis ortodok. Hal itu dapat dicermati dari pandangan mengenai model kekuasaan. Dia melihat bahwa *“That The Supremacy Of A Social Group Manifests It Self In Two Ways, As “Dominatioan” And As “Intellectual And Moral Leadership”* (Gramsci, 1971). Melalui konsep ini, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. *Pertama*, adalah perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa atau dengan kata lain kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa *law enforcemant*. Perangkat kerja yang pertama ini biasanya dilakukan oleh pranata negara (*state*) melalui lembaga seperti hukum, militer polisi, dan bahkan penjara. *Kedua*, adalah perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat beserta pranata-pranatanya untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan bahkan juga keluarga. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh pranata masyarakat sipil (*civil society*) melalui lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, keagamaan, paguyuban, dan kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*). Kedua level ini pada satu sisi berkaitan dengan fungsi hegemoni dimana kelompok dominan langsung atau perintah yang dilaksanakan diseluruh negara dan pemerintahan yuridis.

Perspektif Gramsci bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan memaksa, hasil nyata yang berhasil dicapai dinamakan “dominasi”

stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya. Namun hal ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapi dominasi (bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya) dengan perangkat kerja yang kedua, hasil akhirnya lebih dikenal dengan sebutan “hegemoni”. Dengan demikian supermasi kelompok (penguasa) atau kelas sosial tampil dalam dua cara yaitu, dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual, dan moral. Tipe kepemimpinan yang terakhir inilah yang merupakan hegemoni. Dengan demikian kekuasaan hegemoni lebih merupakan kekuasaan melalui “persetujuan” (konsensus), yang mencakup beberapa jenis penerimaan intelektual atau emosional atas tatanan sosial politik yang ada (Sugiono, 2006: 31).

Gramsci lebih melihat dominasi kekuasaan dengan moralitas jauh lebih mengakar dan dijadikan sebagai salah satu strategi yang kerap dijalankan kekuasaan. Kekuasaan lewat moralitas itu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan hegemoni sarannya adalah ruang agama maupun ideologi-ideologi lain yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Williams mendefinisikan hegemoni sebagai sesuatu tatanan dimana cara hidup dan pemikiran kelompok tertentu menjadi dominan dengan menyebarkan suatu konsep atau realitas keseluruh masyarakat, kelembagaan dan kehidupan pribadinya, yang mempengaruhinya seluruh cita rasa, moralitas, kebiasaan, prinsip agama, politik, dan seluruh hubungan sosial terutama dalam pengertian intelektual dan moral.

Penguasaan ideologi adalah salah satu hal yang diperhatikan karena ia mempermudah hegemoni dijalankan. Bagi Gramsci, ideologi gususan makna, ide dan praktik yang menunjang kelompok sosial yang berkuasa. Ia tidak terpisah dari gugus kegiatan sehari-hari. Untuk itu ideologi seharusnya dimengerti sebagai gejala material yang berakar pada kondisi sehari-hari. Ideologi menjadi sumber pembuatan aturan perilaku sehari-hari dan tindakan moral yang setara dengan agama dalam pengertian sekuler. Ideologi dalam pengertian Gramsci juga mengasumsikan pluralitas kepentingan dan keanekaragaman tujuan. Hanya saja blok hegemonilah yang menyetir dan menjadi pemimpin dari aliansi kelompok-kelompok dengan aneka macam kepentingan ini dan mengibarkan bendera satu tujuan yang mau dicapai bersama yaitu sebuah konsep yang sama tentang dunia (*common conception of the world*) berdasarkan kepentingan penguasa.

Berbeda dengan pandangan Siahian (1999, 2001: 45) melihat dalam proses hegemoni yang dikembangkan Gramsci adalah semua bentuk wacana yang tidak sesuai diskursus resmi (menurut perspektif kelas dominan) selalu ditempatkan sebagai *others*. Pembentukan citra *othersness* sekaligus dipakai sebagai mekanisme menciptakan potret diri yang cenderung eksklusif karena dibangun dengan melibatkan proses kompleks : inklusi-eksklusif. Proses inklusi-eksklusi ini melalui diskursus atau wacana dengan cara mendevalusi, memarginalisasikan, atau kalau perlu membungkam. Proses ini juga menempuh cara yang khas, yakni hirarkisasi dalam sistem biner. Maka konsekuensinya, tidak ada kebenaran diluar wacana yang dikembangkan kelas dominan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pandangan Gramsci tentang hegemoni lebih merupakan suatu kemenangan atas penguasa wacana-wacana kultural yang diperoleh melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Berbagai cara yang dipakai, misalnya melalui mekanisme kelembagaan yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif masyarakat. Sebab itulah hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan (Gramsci, 197: 244). Dalam konteks tersebut, Gramsci lebih menekankan pada aspek kultural (ideologi). Melalui produk-produk, hegemoni menjadi satu-satunya penentu dari sesuatu yang dipandang benar baik secara moral maupun intelektual. Hegemoni kultural tidak hanya terjadi dalam relasi antar negara tetapi dapat juga terjadi dalam hubungan antar berbagai kelas sosial yang ada dalam suatu negara.

Selain itu menurut Gramsci, superioritas ideologi harus memiliki akar ekonomis dan mempunyai landasan sebagai fungsi penentu sehingga sekelompok yang sedang memimpin seakan-akan menjalankan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kesuksesan hegemoni kekuasaan terjadi ketika masyarakat diakar rumput telah menerima dan menjalankan sepenuhnya apa yang menjadi kehendak kekuasaan, bahkan hingga kepersoalan cita rasa. Karena hegemoni yang paling mendasar sesungguhnya adalah proses penciptaan makna. Lewat penciptaan makna itu, seperangkat representasi dan praktik yang bersifat otoritatif diproduksi dan dipertahankan.

Gramsci juga mengkarakterisasikan apa yang dimaksud dengan negara integral sebagai sebuah kombinasi kompleks antara “kediktatoran dan hegemoni” atau seluruh kompleks aktifitas praktis dan teoritis dimana kelas berkuasa tidak hanya menjustifikasi dan menjaga dominasinya, tetapi juga berupaya memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang dikuasai, jadi negara adalah aparatus koersif pemerintah sekaligus aparatus yang hegemonik. Definisi ini menunjukkan tentang negara, yang memandang negara sebagai sistem politik pemerintah belaka dalam teori politik liberal atau teori lainnya seperti institusi koersif kelas berkuasa dalam teori politik marxis klasik. Kelebihan konsepsi Gramsci tentang negara integral adalah karena konsepsi itu memungkinkan dirinya memandang hegemoni dalam batasan dialektik yang meliputi masyarakat sipil atau masyarakat politik (Sugiono, 2006: 37).

Namun menurut Gramsci terdapat tiga tingkatan hegemoni sebagaimana ditulis oleh Musahwi (2014) dalam Suyanto (2010) diantaranya: *Pertama*, hegemoni integral. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara social maupun etis. *Kedua*, hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomi berjuis menghadapi tantangan barat yang menunjukkan adanya potensi disintegrasi. dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembunyi “dibawah permukaan kenyataan”, artinya, sekaligus sistem yang ada telah mencapai

kebutuhan atau sasarannya. Namun “mentalitas” massa tidak sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemonik. karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. situasi demikian yang disebut *decadent hegemony*. Ketiga, hegemoni minimum (*minimal hegemony*). Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibanding dengan dua bentuk diatas. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elite ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Dengan demikian, kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi mereka dengan kelas dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya, politik, sosial, maupun ekonomi, yang secara potensial, bertentangan dengan “Negara baru” yang dicita-citakan oleh kelompok hegemoni itu.

Sedangkan kaum intelektual menurut Gramsci adalah proses bekerjanya kekuasaan yang hegemonik, ia memandang hegemoni dijalankan oleh kaum intelektual organik (Gramsci, 1971: 5). Intelektual organik yang dimaksud orang yang mampu organisator, dan kehadiran terkait dengan struktur produktif, dan politik dari kelompok yang berkuasa. Mereka berfungsi menguniversalisasikan gagasan dan pandangan-pandangan kelompok yang berkuasa dalam rangka mengorganisasi persetujuan dari kelompok sub ordinat, sehingga kelompok yang hendak berkuasa mendapat legitimasi. Kehadiran kaum intelektual organik terkait dengan kelompok penguasa atau pejuang merebutkan kekuasaan. Mereka tampil sebagai juru kampanye

kelompok yang berkuasa atau yang sedang berjuang merebut kekuasaan untuk menyebarkan dan menanamkan ideologi yang telah diorganisir.

Ada beberapa pandangan yang salah kaprah terhadap apa yang dimaksud intelektual organik oleh Gramsci. Beberapa kalangan sekedar memahami bahwa intelektual organik adalah mereka yang mampu menstranformasikan kesadaran rakyat dan mengorganisirnya untuk melakukan perlawanan terhadap para penguasa yang lalim. Intelektual organik yang dimaksud oleh Gramsci adalah semua orang yang mempunyai kemampuan sebagai produsen gagasan dan organisator. intelektual seperti ini bisa berada dan menjadi kaki tangan kekuasaan dalam rangka melanggengkan *status quo* atau memihak kepada rakyat yang tertindas.

Konsep Gramsci tentang intelektual organik, tidak terbatas hanya pada kelompok yang tertindas atau kaum sub ordinat dan penguasa. Karena itu menurutnya setiap kelompok menciptakan sendiri intelektual organik yang memberi homogenitas dan kesadaran pada fungsinya sendiri, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial. Mengingat setiap kelompok sosial mempunyai intelektual masing-masing, apa yang membedakan antara intelektual organik dari kelompok yang sedang yang berkuasa dengan intelektual organik dari kelompok yang lain, seperti dari kaum kapitalis rakyat yang tertindas atau partai politik. Dalam partai politik misalnya, meskipun bukan partai berkuasa didalamnya mempunyai intelektual organik yang bertugas mengorganisir ideologi mereka untuk ditanamkan kepada masyarakat, dalam upaya mencari dukungan untuk memperoleh dukungan kekuasaan, bahkan kaum kapitalis digerman justru memerankan fungsi sebagai intelektual tradisional, dengan menjaga

hak-hak khusus dan menjaga kesadarannya sebagai kelompok independen, karena mereka memegang kekuasaan ekonomi atas tanah yang mereka miliki (Sugiono, 2006: 43).

Dalam menjelaskan tentang peran dan fungsi kaum intelektual selain menjabarkan panjang lebar apa yang dimaksud dengan intelektual organik, Gramsci juga menjelaskan tentang intelektual tradisional dalam kelompok yang tidak memihak, mereka merasa diri mereka otonom dan mereka berasal dari kelompok yang dominan. Kelompok ini humanis memisahkan integensia dari tatanan borjuis. intelektual tradisional adalah mereka yang menyandang tugas-tugas kepemimpinan intelektual dalam suatu *given socety*. Mereka biasanya menjaga jarak secara tidak langsung dengan dunia politik praktis. Mereka sekedar mengkaji dan meneliti dinamika sosial dalam kehidupan masyarakat meskipun terjadi eksploitasi, penindasan, kelaliman, dan sejenisnya. Tindakan yang paling mulia menurut mereka adalah mengkritik penguasa lewat karya ilmiah yang disandarkan pada fakta-fakta objektif yang dialami masyarakat. Namun dunia mereka tetap berjarak dengan masyarakat karena mereka tidak ingin memihak.

1.5.2.2 Bentuk-Bentuk Hegemoni

Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni, bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi. Cara kekerasan (represif/ dominasi) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya dilaksanakan dengan cara-cara halus, dengan maksud untuk menguasai

guna melanggengkan dominasi. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparaturnegara seperti polisi, tentara, dan hakim.

Menurut Gramsci, faktor terpenting sebagai pendorong terjadinya hegemoni adalah faktor ideologi dan politik yang diciptakan penguasa dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membentuk pola pikir masyarakat. Faktor lainnya, *pertama* paksaan yang dialami masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa, hukuman yang menakutkan, *kedua* kebiasaan masyarakat dalam mengikuti suatu hal yang baru, *ketiga* kesadaran dan persetujuan dengan unsur-unsur dalam masyarakat (Patria dan Arief, 2009: 117).

1.5.2.3 Fungsi Hegemoni

Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan “tidak hanya mengatur” masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual. Hegemoni di atur oleh mereka yang oleh Gramsci disebut “intelektual organik”. Mereka adalah tokoh moral dan intelektual yang secara dominan menentukan arah konflik, politik, dan wacana yang berkembang di masyarakat. Mereka bekerja untuk melanggengkan kekuasaan atas kelompok yang lemah. Dominasi “intelektual organik” diwujudkan melalui rekayasa bahasa sebagai sebuah kekuasaan. Melalui berbagai media bahasa ditunjukkan hadirnya kekuasaan dan pengaturan hegemoni tersebut. Berbagai kebijakan negara, misalnya, disampaikan dalam bahasa “untuk kepentingan bangsa di masa mendatang” atau “demi kemandirian bangsa” telah menghegemoni masyarakat untuk senantiasa menerima berbagai keputusan negara, yang merugikan sekalipun. Misalnya,

hegemoni bahasa politik digunakan oleh para politisi untuk membantu bagaimana bahasa digunakan dalam persoalan-persoalan (1) siapa yang ingin berkuasa, (2) siapa yang ingin menjalankan kekuasaan, dan (3) siapa yang ingin memelihara kekuasaan.

Fungsi lain hegemoni yakni, menciptakan cara berpikir yang berasal dari wacana dominan, juga media yang berperan dalam penyebaran wacana dominan itu. Hegemoni dipergunakan untuk menunjukkan adanya kelas dominan yang mengarahkan tidak hanya mengatur masyarakat melalui pemaksaan kepemimpinan moral dan intelektual (Sugiono, 2006: 31).

1.5.3 Landasan Konseptual

1.5.3.1 Konsep Hegemoni

Hegemoni merupakan gagasan Antonio Gramsci (1891-1937) yang bersumber dari buku *selection from prison notebooks*. buku ini adalah catatan Gramsci selama dipenjara antara tahun 1929-1935. Teori Hegemoni Antonio Gramsci menganalisa berbagai relasi kekuasaan dan penindasan di masyarakat. lewat perspektif hegemoni, akan terlihat bahwa penulisan, kajian suatu masyarakat, dan media massa merupakan alat kontrol kesadaran yang dapat digunakan kelompok penguasa (Patria dan Arief, 2009: 115).

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno “*egemonia*” yang berarti penguasa atau pemimpin. Secara ringkas, pengertian hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa.

Antonio Gramsci membangun suatu teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan. Media dapat menjadi sarana di mana satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lain. Proses bagaimana wacana mengenai gambaran masyarakat bawah bisa buruk di media berlangsung dalam suatu proses yang kompleks. Proses marginalisasi wacana itu berlangsung secara wajar, apa adanya, dan dihayati bersama. Khalayak tidak merasa dibodohi atau dimanipulasi oleh media. Konsep hegemoni menolong kita menjelaskan bagaimana proses ini berlangsung.

Hegemoni menekankan pada bentuk ekspresi, cara penerapan, mekanisme yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri melalui para korbannya, sehingga upaya itu berhasil dan mempengaruhi dan membentuk alam pikiran mereka. Melalui hegemoni, ideologi kelompok dominan dapat disebarkan, nilai dan kepercayaan dapat dipertukarkan. Akan tetapi, berbeda dengan manipulasi atau indoktrinasi, hegemoni justru terlihat wajar, orang menerima sebagai kewajaran dan sukarela.

Salah satu kekuatan hegemoni adalah bagaimana ia menciptakan cara berpikir atau wacana tertentu yang dominan, yang dianggap benar, sementara wacana lain dianggap salah. Media di sini dianggap secara tidak sengaja dapat menjadi alat bagaimana nilai-nilai atau wacana yang dipandang dominan itu disebarkan dan meresap dalam benak khalayak sehingga menjadi konsesus bersama. Sementara nilai atau wacana lain dipandang sebagai menyimpang. Misalnya, pemberitaan mengenai

demonstrasi buruh, wacana yang dikembangkan seringkali perlunya pihak buruh musyawarah dan kerja sama dengan pihak perusahaan. Dominasi wacana semacam ini menyebabkan kalau buruh melakukan demonstrasi selalu dipandang tidak benar.

Di sini menggambarkan bagaimana proses hegemoni bekerja. Ia berjalan melalui suatu proses atau cara kerja yang tampak wajar. Dalam produksi berita, proses situ terjadi melalui cara yang halus, sehingga apa yang terjadi dan diberitakan oleh media tampak sebagai suatu kebenaran, memang begitulah adanya, logis dan bernalar (*common sense*) dan semua orang menganggap itu sebagai suatu yang tidak perlu dipertanyakan.

Teori hegemoni Gramsci menekankan bahwa dalam lapangan sosial ada pertarungan untuk memperebutkan penerimaan publik. Karena pengalaman sosial kelompok subordinat (apakah oleh kelas, gender, ras, umur, dan sebagainya) berbeda dengan ideologi kelompok dominan untuk menyebarkan ideologi dan kebenarannya tersebut agar diterima, tanpa perlawanan. Salah satu kunci strategi kunci dalam hegemoni adalah nalar awam (Patria dan Arief, 2009: 116).

1.5.3.2 Konsep Kiai

Istilah kiai pada umumnya dipakai oleh masyarakat Jawa untuk menyebut orang laim-bentuk jamak alim dalam bahasa Arab adalah ulama-dalam tradisi masyarakat muslim. Kiai biasanya memiliki kharisma dan pada umumnya memimpin sebuah pesantren, mengajarkan kitab klasik (kitab kuning) dan atau memiliki keterikatan dengan kelompok Islam tradisional (Dhief, 1986: 55) dalam (Suprayogo, 2007: 27).

Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia makna kiai merujuk kepada figur seorang pemimpin non-formal-kultural dan memiliki kedalaman ilmu keagamaan (Hajar, 2009: 21). Jadi secara sederhana dapat disimpulkan kiai adalah pemimpin non-formal-kultural yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dibidang keagamaan memiliki kharisma dan pemimpin sebuah pesantren. Kiai sebagai tokoh sentral dan pemegang otoritas pesantren, Kiai sebagai pemimpin, ayah dan pengasuh para santri dan kemudian komunitas sosial disekitarnya. Menurut Mas'ud (2004: 236-237) dalam Tukiman (2013: 6-7) memasukkan kiai kedalam lima tipologi yaitu:

1. Kiai (ulama'), yang mengkonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab, seperti KH. Ahmad Dahlan.
2. Kiai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam, karena keahlian mereka dalam berbagai ilmu pengetahuan, pesantren mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-Qur'an.
3. Kiai karismatik yang memperoleh karismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari sufismenya, misalnya KH. Kholil Bangkalan.
4. Kiai da'i keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik dengan misionarisme dengan bahasa retorika yang efektif Alm. K. Zainuddin. Mz

5. Kiai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya, serta kedalaman ilmu keagamaan yang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpin yang paling menonjol, seperti KH.Hasyim Asy'ari.

1.5.3.3 Konsep *Blater*

Istilah *blater* lebih dikenal dikalangan masyarakat Madura bagian barat (Sampang dan Bangkalan). Istilah ini merujuk pada sosok orang kuat di desa yang bisa memberikan perlindungan keselamatan secara fisik terhadap masyarakat (Rozaki, 2004: 9). Sosok *oreng blater* yang sampai saat ini menjadi legenda dikalangan masyarakat Madura adalah Bapak Sakera yang telah gagah berani membela *orang kene'* dari kejahatan penjajah. Kata-kata Bapak Sakera yang masih terkenal. ketika ia akan dihukum gantung oleh belanda adalah “*Gupermen keparat, je'angabunga, bender sengkok' mate, tape enga' sittung Sakera mate, Sebu Sakera tombu pole*”.

Istilah lain dari *blater* adalah bajingan. Namun, menurut komunitas *blater*, status sosial bajingan dipandang lebih rendah. Bajingan dikenal sebagai sosok yang angkuh, kasar, sombong, dan suka membuat keonaran. aktivitas yang melekat pada bajingan adalah; berjudi, minuman keras, main perempuan, poligami, mencuri, merampok, dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya. dalam realitas. karakter dan aktivitas diatas bisa saja melekat pada kaum *blater*, sehingga sulit membedakan keduanya. media sosial *blater* paling terkenal adalah *remoh*. Melalui forum hiburan tradisional ini, mereka membangun relasi dengan sesama dan saling menunjukkan kelebihan masing-masing.

selain *remoh*, terdapat media lain seperti *kerapen sapeh*, *sabung ajem*, *ando'an dereh*, dan sejenis perjudian lainnya.

Secara kultural, peranan dan pengaruh *oreng blater* biasanya diperoleh karena dua hal. *Pertama*, kemampuan dalam ilmu kanoragan, ilmu bela diri, ilmu kekebalan, sikap pemberani dan jaringan anak buah yang luas. Sukses meraih kemenangan carok dan keberhasilan dalam mencegah konflik (kekerasan) antar individu dalam masyarakat semakin memperkuat pengaruh dan sosoknya sebagai *oreng blater*. *Kedua*, keterlibatannya dalam dunia kriminalitas dan aksi kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung menjadikan *oreng blater* semakin “disegani”. bukan saja oleh masyarakat. tapi juga oleh aparat negara (Rozaki, 2004: 10).

Sebagai kelompok elite di desa, daya tawar *blater* cukup kuat. keberadaan mereka sebagai orang kuat di desa serngkali “menentukan” aman tidaknya desa dari aksi pencurian, prampokan, dan pertikaian antar warga. Gerombolan penjahat akan berpikir sepuluh kali untuk mengacau sebuah desa, yang didalamnya tinggal *oreng blater*. Lebih-lebih jika *blater* tersebut tergolong *blater* papan atas. demikian pula, konflik-konflik sosial antar warga banyak diselesaikan melalui mediasi *blater*. Dalam bidang bisnispun keterlibatan *blater* menjadi hal biasa. untuk keamanan bisnis. Tempat usaha dan perkantoran, para pengusaha tidak hanya percaya kepada satpam dan aparat kepolisian, tapi juga sering diback-up dengan menggunakan jasa kaum *blater*.

Dalam bidang politik, keterlibatan *blater* juga sangat kentara. Fenomena yang paling lumrah adalah kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Antar *blater* dan arena

Pilkades bagai gula dan semut. Dimana ada Pilkades disitu dapat dipastikan keterlibatan *blater*. mereka, melalui jaringan yang luas dan kuat, seringkali menjadi penentu sukses tidaknya acara pilkades, dan juga menjadi penentu terpilih tidaknya calon kepala desa. Bahkan tidak jarang terjadi dengan dalih keamanan dan gengsi, kepala desa justru dipilih dari kalangan *blater*. kepala desa terpilihpun-yang tidak berasal dari kalangan *blater*-harus bisa bergaul dengan mereka. demikian pula dalam kasus Pilkada, dan Pemilu, para pentolan partai Cabup, Caleg dan tim suksesnya sering menggunakan “jasa” *blater* untuk memenangkan “pertarungan”. Konon, ketika sistem pemerintahan Madura masih berbentuk kerajaan, para raja banyak melibatkan *blater* dalam mempertahankan atau merebut kekuasaan. demikian pula dimasa penjajahan, kehadiran *blater* tetap penting. Kaum penjajah banyak merekrut komunitas *blater* sebagai antek-anteknya.

1.5.3.4 Konsep Pemenangan Pemilihan Presiden 2014

Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden secara langsung merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Dengan adanya Pemilu, maka telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat, selain itu dengan adanya Pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai, dan tertib, kemudian menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa

faktor, diantaranya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etik, suku, dan kondisi keografis. Pelaksanaan Pemilu dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan baik dari jumlah partai politik maupun tata cara dalam pemilihan, oleh karena itu dibutuhkan suatu kerjasama yang baik antara rakyat dan pemerintahan yang mengatur jalannya Pemilu (Riyanto, 2011: 83).

Berlangsungnya Pemilu yang demokratis harus menjamin pemilihan secara jujur adil dan perlindungan bagi masyarakat yang memilih. Setiap masyarakat yang mengikuti Pemilu harus terhindar dari rasa ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktek curang lainnya. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV pasal 28G bahwa di dalam negara demokrasi setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pemenangan Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 merupakan ujung dari pesta demokrasi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2014 hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum dan pemilihan eksekutif dengan sistem yang dipakai presidensial merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara demokratis, pun Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dua kandidat calon presiden nomer

urut satu Prabowo Subianto yang diusung dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Wakil Presiden nomer urut 1 Hatta Rajasa yang diusung dari Partai Amanat Nasional (PAN) sedangkan calon presiden nomer urut 2 Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Calon Wakil Presiden Nomer Urut dua Jusuf Kalla yang diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pesta demokrasi tahun 2014 tahun lalu sangat dipenuhi dengan kepentingan golongan yang sangat tidak medidik terhadap rakyat Indonesia media massa dan media cetak ikut andil mendukung salah satu calon. Netralitas dan independensi dari media sudah sangat tidak bisa dipercaya TVOne, RCTI dalam hitungan cepat memenangkan Nomer Urut 1. Sedangkan MetroTV dan Kopas TV memenangkan nomer urut 2 meski pada ujungnya pesta demokrasi kemarin telah resmi mengantarkan Jokowi-JK menjadi presiden republik Indonesia yang ke-7.

Namun berbeda dari hal tersebut yang menjadi kajian peneliti dalam tulisan ini adalah hegemoni Kiai dan *blater* dalam memenangkan pemilihan presiden tahun 2014 khususnya di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebab di daerah ini tahun kemarin sempat mengejutkan publik sebab Prabowo-Hatta menang telak dari pada Jokowi-Jk banyak orang berpekulasi karena Prabowo-Hatta dapat dukungan dari kaum *blater* dan Kiai. sehingga dalam tulisan ini peneliti ingin meneliti persoalan tersebut (*Tempo*. 16/6/14).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, menurut Moleong, (2002: 6) dalam Rosi, (2014: 33). Merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Selain itu menurut Marshal, (1995) dalam Sarwono (2006: 193) Penelitian kualitatif adalah didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

Definisi di atas menunjukkan beberapa kata kunci dalam riset kualitatif, yaitu proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi, dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam riset kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih fokus pada proses dari pada hasil akhir. Karena proses memerlukan waktu dan kondisi yang berubah-ubah maka definisi ini akan berdampak pada desain riset dan cara-cara dalam melaksanakannya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel. (Sarwono, 2006: 193).

Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah. Sekalipun demikian, penelitian kualitatif tidak hanya membatasi penelitian pada manusia saja. Sasaran lain dapat berupa kejadian, sejarah, benda berupa foto, artefak, peninggalan-peninggalan peradaban

kuno dan lain sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif adalah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya. (Sarwono, 2006: 194).

Dalam penelitian ini, peneliti mencari data-data dari informan yang kemudian dideskripsikan sesuai dengan bahasa yang mudah dimengerti, dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan yang intens terhadap masyarakat untuk bisa mengetahui terhadap kejadian sosial yang terjadi dimasyarakat sehingga bisa mengetahui dan mendapatkan hasil yang maksimal terhadap kejadian sosial tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan peneliti menggunakan deskriptif adalah untuk mendeskripsikan Hegemoni kiai dan *blater* dalam proses kemenangan Pilres 2014 di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dimana seorang kiai mempunyai dua fungsi yaitu sebagai tokoh agama juga sebagai politisi (ikut andil menentukan kebijakan publik), begitupun *blater* dengan kekuatannya akan mampu mengajak massa untuk mendukung pilihannya.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berbentuk analisis, berupa kata-kata, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian penelitian tersebut, pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan apa dan bagaimana akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara terperinci dan relatif akurat mengenai persoalan yang diangkat dalam penulisan ini. Segala kegiatan pengumpulan data diperoleh dari informan yang terkait dengan persoalan ini.

Sementara itu untuk mendapatkan data yang lebih luas peneliti tidak hanya berpatokan terhadap metode kualitatif saja, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yang terfokus pada keinginan untuk mengetahui keragaman (*diversity*) dan kekhususan (*particularity*) objek studi penelitian. Hasil akhir yang diperoleh adalah menjelaskan keunikan kasus yang dikaji (Agus Salim, 2006: 122). Studi kasus berlaku apabila suatu peristiwa “bagaimana” dan “mengapa” diajukan terhadap seperangkat peristiwa masa kini, yang mustahil atau setidaknya bisa dikontrol periset.

Dengan penelitian kualitatif dan melalui metode pendekatan studi kasu akan membantu peneliti menemukan fenomena atau realitas sosial sesuai dengan maksud dan tujuan yang peneliti lakukan. Sehingga bagi peneliti pendekatan penelitian lapangan cukup membantu dalam mendaptkan data yang lebih valid dan kongkrit.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid, dalam proses penggalian data dan informasi mengenai hegemoni kiai dan *blater* dalam proses pemenangan pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. Peneliti menggunakan beberapa metode yang bersumber data Primer dan data Skunder.

1.6.3 Sumber Data Primer

Sugiyono (2011: 225) menjelaskan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan dan data tersebut berupa wawancara langsung dari sumber utama yaitu kiai dan *blater*.

Adapun sumber data primer ini, pengumpulan datanya menggunakan metode observasi dan metode wawancara mendalam. Untuk lebih memahami metode observasi dan wawancara mendalam peneliti akan memberikan penjelasan mengenai kedua metode untuk mendapatkan data penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi bagi peneliti sangatlah berguna untuk mendapatkan gambaran tentang hegemoni kiai dan *blater* dalam proses pemenangan pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. Observasi atau biasa disebut pengamatan lapangan bagi peneliti membantu keberlangsungan penelitian yang hendak ingin dicapai sebagai persoalan yang perlu di ungkap mengenai hegemoni kiai dan *blater* dalam proses pemenangan pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 khususnya di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan (Moleong 2007: 147-175).

Observasi adalah teknik pengamatan memungkinkan melihat, mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya atau pengamatan memungkinkan mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung peneliti turun langsung untuk mengetahui persoalan tersebut (Moleong, 2014: 146).

2. Wawancara

Metode ini membantu peneliti untuk mengetahui langsung dari informan dengan melakukan dialog langsung dengan menggunakan *interview guide* untuk memperoleh informasi (Sugiyono, 2011: 233). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-dept intewiew*) dengan tidak terstruktur.

1.6.4 Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2011: 225), sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan melainkan dari sumber lain yaitu; Profil Desa Socah, buku, laporan penelitian terdahulu, jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Dalam artian bahwa peneliti harus memperoleh data ini melalui data-data tertulis atau dokumen terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1.6.5 Metode Pemilihan Informan

Dalam menentukan informan Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. *Purposive sampling* merupakan salah satu teknik dalam pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa, kata *purposive* berarti sengaja. Dalam sederhananya, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja/bertujuan. Peneliti menentukan sendiri sendiri informan yang diambil karena ada pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampel ini peneliti menentukan sendiri

untuk menentukan informannya, sehingga peneliti tidak kerepotan dalam pengambilan sampelnya. Tentu pemilihan dan pemilahan yang di pilih oleh peneliti adalah informan yang dapat memberikan informasi secara maksimal guna membantu apa yang diinginkan oleh peneliti. Sehingga peneliti mempertimbangkan untuk memilih informan yang memang benar-benar memahami kondisi kehidupan di Lapangan, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kiai, punya pesantren, berumur 35-60 tahun, pernah terlibat dalam politik praktis, ikut andil dalam kemenangan pemilihan presiden tahun 2014, pendidikan minimal SD/Sederajat
2. *Blater* berumur 35-60 tahun, terlibat dalam politik praktis, ikut andil dalam kemenangan pemilihan presiden tahun 2014, pendidikan minimal SD/Sederajat.
3. Tokoh Masyarakat (Sekdes dan kadus) , ikut andil dalam proses kemenangan pemilihan presiden tahun 2014, pendidikan minimal SD/Sederajat.
4. Tokoh perempuan, berumur 35-60 tahun, mengetahui tentang keterlibatan kiai dan *blater* dalam proses Pilres 2014, Pendidikan minimal SD/Sederajat.
5. Tokoh Pemuda, mengetahui tentang keterlibatan kiai dan *blater* dalam proses Pilpres 2014, berumur 18-30 tahun, pendidikan minimal SD/Sederajat.
6. Santri/alumni pondok pesantren berumur 18-25, pendidikan mimal SD/Sederajat.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2007: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai data tersebut dapat jelas sehingga akan mendapatkan hasil yang cukup memadai. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis data terhadap jawaban yang dilontarkan informan, sehingga jika dirasa jawaban dari informan belum memuaskan atau kurang mewakili dari pertanyaan pewawancara maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi kepada informan. Setelah selesai maka peneliti melakukan analisis data kembali agar cukup sempurna apa yang telah di tuturkan oleh informan kepada peneliti.

Untuk memudahkan proses analisis data, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yang didasarkan pada paradigma positivis Myles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246) dengan tiga hal, diantaranya adalah sebagai berikut ;

1. Reduksi data adalah mereduksi data atau merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya mengenai realitas hegemoni kiai dan *blater* kaitannya dengan pemenagan pemilihan presiden Republik Indonesia Tahun 2014 baik dalam internal maupun eksternal (masyarakat sekitar). Reduksi data ini menjadi sangat penting sebagai identifikasi satuan data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan

fokus dan masalah penelitian yang peneliti angkat. Reduksi data ini dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik seperti computer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian data merupakan penyajian yang dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya dalam menyajikan data terkait dengan fokus dan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya mengenai hegemoni kiai dan *blater* dalam kemenangan pemilihan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. Sehingga akan membantu peneliti untuk memperdalam data yang diperlukan sebagai pengembangan deskripsi yang komprehensif dan telitei dari hasil penelitian.

Penjelasan di atas merupakan proses yang akan peneliti gunakan sebagai bentuk analisis data dalam penelitian tersebut. Dengan demikian peneliti akan cukup terbantu melalui 3 metode yang dijelaskan Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data nantinya.

1.6.7. Metode Pemeriksaan Keabsahan Data

Metode pemeriksaan keabsahan data merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti guna memeriksa kevalidan data yang diperoleh nantinya di lapangan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini membantu peneliti untuk memperkuat

hasil data observasi dan wawancara dilapangan sebagai kontrol sumber data kualitatif yang kurang kredibel agar akurasi dan keabsahan hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti dapat melakukan pemeriksaan keabsahan data melalui proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.

Menurut Denzin dalam (Moleong, 2007: 330-331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan penggunaan *sumber*, *metode*, *penyidik*, dan *teori*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber, data-data penelitian yang diperoleh peneliti, dibandingkan dan dicek derajat kredibilitasnya melalui waktu dan alat yang berbeda, dalam metode kualitatif ada beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam mengecek dan membandingkan data yang diperoleh, cara-cara tersebut sebagai berikut:

Pertama, peneliti membandingkan antara hasil data pengamatan dengan hasil data wawancara. *Kedua*, peneliti membandingkan pendapat yang dikatakan informan di depan umum dengan pendapat yang dikatakan secara pribadi. *Ketiga*, membandingkan keadaan dan perspektif subjektif penelitian, sepanjang penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. *Keempat*, peneliti membandingkan keadaan dari perspektif sumber informasi (informan) dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain. *Kelima*, membandingkan antara data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan (Moleong, 2000: 178).

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura. Dengan pertimbangan. *Pertama* Di Desa Socah keterlibatan kiai dan *blater* sangat menonjol dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk menentukan hak politik masyarakat. *Kedua*, karena Kabupaten Bangkalan merupakan tempat lahirnya Syaichona Kholil Bin Abdul Latif yang dijadikan guru oleh mayoritas kiai Madura secara khusus dan Indonesia secara umum pun tidak jarang dijadikan alat untuk hegemoni masyarakat oleh keturunannya baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia politik praktis (birokrasi). *Ketiga*, Karena pemilihan presiden dan wakil presiden khususnya di Kabupten Bangkalan suara Capres nomer urut 1 Prabowo-Hatta menang jauh dari Capres nomer urut 2 Jokowi-Jk, di 20 TPS, calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat nol persen suara (*Tempo*, 16/7/14).

1.7.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih satu (3) bulan dengan tahapan sebagai berikut :

[illegible]